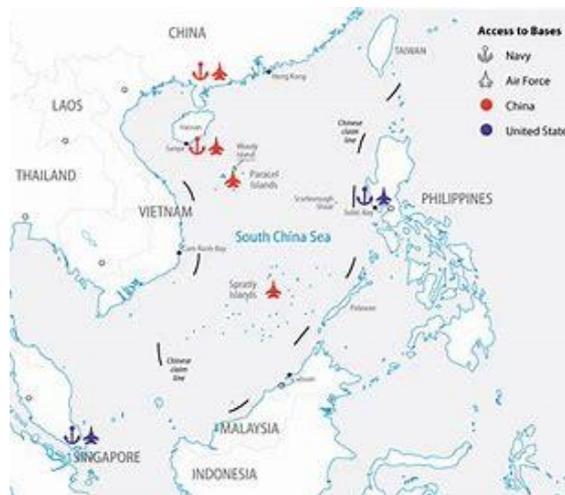


# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Konfrontasi Laut China Selatan merupakan salah satu isu yang masih hangat diperdebatkan hingga saat ini dan masih belum menemukan titik terang penyelesaian klaim wilayah laut tersebut dengan negara-negara terlibat diantaranya yakni China, Vietnam, Filipina, Taiwan, Brunei Darussalam, Malaysia, hingga Amerika Serikat (AS). Sengketa ini terkait dengan klaim kedaulatan atas beberapa pulau dan wilayah di Laut China Selatan yang kaya akan sumber daya alam, China mengklaim sebagian besar wilayah Laut China Selatan, sementara negara-negara lain juga memiliki klaim yang saling tumpang tindih.



Gambar 1.1 Peta Laut Cina Selatan (Jie, 2016)

Kawasan Pasifik Selatan merupakan wilayah luas yang terdiri dari negara-negara kepulauan dengan jumlah populasinya yang cenderung minim. Kawasan ini cukup terkenal karena dinilai memiliki sumber daya alam yang melimpah, akan tetapi karena terbatasnya keterampilan dari SDM dan teknologi, kawasan ini tentunya memerlukan bantuan dari negara lain agar dapat dikelola. Dari dua puluh lima negara yang berada di Kawasan Pasifik sepuluh diantaranya merupakan negara yang sebagian besar pendapatannya berasal dari Bantuan Resmi Pembangunan (ODA) dengan nominal yang tinggi, sehingga bantuan luar negeri

menjadi salah satu alat yang berperan penting dalam dinamika perpolitikan Kawasan Pasifik Selatan (Dornan & Pryke, 2017).

Wilayah laut yang dinilai sangat strategis dan membawa manfaat ekonomis yang sangat besar bagi suatu negara sebagai jalur utama transportasi, perdagangan, pasokan energi, navigasi internasional, penerbangan, bahkan strategi keamanan global menjadi banyaknya faktor atas ketertarikan masing masing negara agar terlibat dan mengklaim sepenuhnya wilayah Laut China Selatan sebagai bagian dari negara mereka. Hal tersebut tentunya berpotensi menimbulkan ketegangan antara negara-negara yang terlibat bahkan dapat semakin memperkeruh stabilitas kawasan bagi beberapa negara disekitar kawasan yang secara tidak langsung terlibat dalam konflik.

Sebagian besar negara di Kawasan Pasifik Selatan merupakan negara yang menjadi penerima bantuan luar negeri terbesar. Selain itu, tentunya terdapat aktor yang sedang berusaha untuk meningkatkan pengaruhnya di Kawasan Pasifik Selatan yang salah satunya adalah China. Masuknya China ke Kawasan Pasifik Selatan menimbulkan rivalitas antar kepentingan nasional. Pengaruh China mulai terlihat semakin signifikan dengan ditandai oleh besarnya bantuan ekonomi yang diberikan untuk negara kawasan yang memiliki hubungan Kerjasama dengan China. Hal ini turut menjadikan China sebagai pendonor bantuan terbesar setelah Amerika Serikat dan Australia, sehingga pada saat yang bersamaan China mendapat julukan "*new banker*" di kawasan tersebut (Dugis, 2018).

Dalam hal ini China berupaya membangun pangkalan militer dan lawatan semi milernya melalui jalur laut yang di proyeksikan sebagai alternatif untuk bertahan dalam masa krisis, bahkan China diduga akan membangun pangkalan militer di Vanuatu. Selain itu Vanuatu juga sangat antusias dengan hadirnya China ditandai dengan keikutsertaann Vanuatu

dalam memprakarsai Visi Global China yang dikenal dengan istilah OBOR (*One Belt One Road*) (Smyth, 2019).

Dengan adanya kebangkitan ekonomi dan pembangunan kekuatan militer China yang mulai menggeser dominasi kepemimpinan Amerika Serikat, sehingga mendorong Amerika Serikat untuk memperkuat dominasinya di Asia Pasifik dengan meningkatkan kehadiran pangkalan militernya di Australia, Singapura, dan Guam, serta peningkatan kegiatan Armada VII di wilayah Laut China Selatan dalam bentuk latihan militer bilateral dengan beberapa *claimant states* (Junef, 2018). Hadirnya China dalam konflik ini menjadi kekhawatiran besar bagi beberapa negara terutama Amerika Serikat yang saat ini dipimpin oleh Joe Biden, bersamaan dengan komitmennya yang dibahas dalam kebijakan luar negeri dengan melakukan upaya sedemikian rupa dalam rangka memperbaiki citra AS yang telah memburuk pasca kepemimpinan Donald Trump.

Dalam perjalanannya hingga saat ini, Joe Biden mengambil upaya dengan kembali merangkul sekutu lamanya yang telah ditinggalkan oleh Trump guna membangkitkan hegemoni dan mempertahankannya. Hal tersebut tentunya dipicu akibat kegagalan dalam fokus kebijakan *American First* milik Trump yang menimbulkan *multiplier effect* dalam berbagai sektor terutama keterpurukan ekonomi dibawah kepemimpinannya.

Amerika Serikat (AS) telah mengeluarkan kebijakan luar negerinya di LCS (Laut China Selatan) sejak pertengahan 1990-an ketika ketegangan muncul akibat perebutan Mischief Reef oleh China pada akhir 1994. Melalui juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, pemerintah Wasinghton secara tegas mengatakan terdapat lima poin kunci mengenai kebijakan Amerika Serikat di LCS pada Mei 1995 (Departemen Luar Negeri AS, 1995), yang meliputi: (1) penyelesaian sengketa secara damai; (2) memelihara perdamaian dan stabilitas kawasan; (3) menjaga kebebasan navigasi; (4) netralitas dalam sengketa; dan (5) menghormati prinsip-

prinsip internasional dalam Konvensi PBB tahun 1982 tentang Hukum Laut (Darmawan & Lintang, 2017). Amerika Serikat menyatakan bahwa keterlibatannya dalam sengketa Laut China Selatan merupakan bentuk upaya untuk menjaga kebebasan navigasi kapal di perairan internasional, menjaga perdamaian dan mengurangi risiko sengketa di kawasan, dan tidak berpihak pada negara mana pun dalam sengketa (Darmawan & Ndadari, 2017).

Amerika Serikat memiliki kepentingan strategis di wilayah Asia Tenggara, termasuk Laut China Selatan, karena merupakan jalur perdagangan utama dan memiliki sumber daya alam yang penting. Amerika Serikat juga memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah tersebut. Oleh karena itu, Amerika Serikat telah terlibat dalam sengketa Laut China Selatan dan mengecam klaim China yang dianggap melanggar hukum internasional. Namun hal tersebut juga diikuti dengan berbagai aktivitas yang diantaranya yaitu adanya dukungan yang Amerika siapkan bahwa serangan bersenjata terhadap Angkatan Bersenjata Filipina, kapal umum, atau pesawat terbang di Laut Cina Selatan akan mengaktifkan komitmen pertahanan timbal balik Amerika.

Berdasarkan Pasal IV Perjanjian Pertahanan Timbal Balik AS-Filipina tahun 1951 mewajibkan kedua negara untuk saling membantu jika terjadi serangan (The Associated Press, 2021) dan mengambil langkah-langkah untuk meyakinkan masyarakat internasional bahwa pihaknya berkomitmen pada tatanan maritim berbasis aturan yang menghormati hak semua negara, baik besar maupun kecil. Hal tersebut tentu ditolak sepenuhnya oleh Amerika mengingat klaim yang dilakukan oleh China tidak sah karena melebihi zona maritim dibawah Hukum Internasional, melalui kebijakan Amerika bersikeras agar perselisihan maritim di antara RRC dan negara-negara tetangganya yang terlibat dapat diselesaikan secara damai melalui arbitrase yang didukung oleh pihak ketiga yakni PBB.

Hadirnya Amerika Serikat dalam sengketa ini merupakan salah satu aspek penting yang mempengaruhi dinamika politik dan keamanan di kawasan Asia Pasifik. Amerika Serikat memiliki minat strategis yang signifikan di Laut China Selatan, yang termasuk dalam kerangka kebijakan luar negeri dan keamanannya di kawasan tersebut. Pada tahun 2016, Amerika kembali menunjukkan kehadirannya dalam konflik ini dengan meluncurkan pengaduan terhadap klaim China di Pengadilan Arbitrase Permanen, menuduh bahwa klaim China melanggar hukum internasional. Meskipun demikian China menolak untuk melaksanakan putusan tersebut, langkah ini menunjukkan bahwa Amerika berdedikasi untuk menyelesaikan konflik Laut China Selatan melalui prosedur hukum internasional. Namun disisi lain ketika konfrontasi yang semakin memanas, China mulai mengambil tindakan berupa menambahkan jumlah anggaran militer di tahun 2020 mencapai 6,6% sebanyak 178 miliar US Dollar, hal tersebut juga pemantik bagi sengitnya konfrontasi wilayah ini dimana anggaran China tersebut dinilai bersaing langsung dengan kekuatan militer nomor satu yakni AS yang memiliki jumlah sebesar 738 miliar US Dollar (Sebayang, 2020).

Pada tahun 2020 lalu pada tahun terakhir kepemimpinan Trump di AS, diketahui bahwa Ia telah menerjunkan tentara sebanyak 375.000 disertai dengan tiga kapal induk dan sejumlah 60% kapal perang milik AS (Sebayang, 2020) guna mendukung jalannya patroli di Laut China Selatan untuk menunjukkan dukungan bagi negara-negara ASEAN dan untuk menegaskan kehadirannya di wilayah tersebut. Berselang satu tahun dari masa kepresidenan Trump, pada 2021 dua bulan pasca pelantikan Presiden Biden langsung bergerak cepat dalam pergolakan konfrontasi di LCS dengan membawa sekutu bersama Jerman, Inggris, dan Prancis beserta kekuatan masing masing militer guna memerangi bahaya yang dapat ditimbulkan atas kegiatan China di wilayah laut yang bertentangan dengan Hukum Laut Internasional. Bahkan tak sampai disitu, Presiden Biden turut mengadakan latihan bersama angkatan laut Australia, Jepang, dan

Kanada dalam rangka operasi untuk menegakan kebebasan navigasi di kawasan LCS (Sorongan, 2021).

Pergeseran *Center of Gravity* ekonomi dunia dari Eropa ke Asia Pasifik telah memposisikan Laut Cina Selatan sebagai kemaritiman yang berperan penting bagi negara-negara Asia Pasifik, khususnya Amerika Serikat yang melihat pesatnya pertumbuhan ekonomi di Asia seperti China dan negara-negara di kawasan Laut Cina. Pada perjalanannya, penggunaan Laut Cina Selatan sebagai rute utama transportasi yang wilayah perairannya menjadi jalur perlintasan aktivitas pelayaran kapal-kapal internasional terutama jalur perdagangan lintas laut.

Navigasi perdagangan internasional yang menopang lalu lintas laut yang mencapai sepertiga kapal di dunia berlayar melalui Laut China Selatan sebagai rute utama mereka sebagai jembatan penghubung antara negara industri seperti Jepang dan Korea dengan negara kawasan sekitar Laut China Selatan yang membawa komoditas vital bagi masing masing negara terutama kepada negara yang berada di kawasan dengan konsumen yang tinggi seperti Eropa, Asia Barat, hingga Afrika (Zahra, 2021). Selain itu, adapun nilai perdagangan yang melalui kawasan ini pada 2020 lalu totalnya hampir mencapai US\$4 triliun (U.S. Embassy, 2020).

Dalam hal ini Amerika Serikat (AS) sebagai aktor negara memiliki kepentingan dalam kebebasan navigasi dan perdagangan tak terbatas di Laut China Selatan sebagai tantangan bagi pemerintah AS terhadap klaim-klaim maritim yang berlebihan dan tidak sesuai dengan hukum laut internasional guna memenuhi tujuan yang hendak dicapai. Maka dari itu penulis akan mencoba meneliti lebih lanjut bagaimana Perbedaan Kebijakan Amerika Serikat dalam Konfrontasi Laut Cina Selatan Sebagai Upaya Menjaga Stabilitas Kawasan yang Bebas dan Terbuka pada Era Presiden Trump dan Presiden Biden.

## 1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis, maka pertanyaan yang diajukan penulis pada penelitian ini yaitu, **“Bagaimana pergeseran kebijakan Amerika Serikat dalam menyikapi konfrontasi Laut China Selatan sebagai upaya menjaga stabilitas Kawasan yang bebas dan terbuka dari era Presiden Donald Trump menuju Kepemimpinan Joe Biden?”**

## 1.3. KERANGKA TEORI

### 1. Teori Realisme

Realisme merupakan salah satu dari banyaknya persepektif dalam studi hubungan internasional. Salah satu tokoh realis bernama Hans Morgenthau mengemukakan bahwa teori ini memusatkan perilaku negara-bangsa yang didasari oleh *power*, teori ini juga memiliki asumsi dasar yakni adanya sifat pesimis dari manusia yang pada dasarnya menganggap sistem internasional bersifat anarkis (kompetitif dan konflikual) yang berarti sebuah negara harus bersaing guna mencapai kepentingan nasionalnya (Bakry, 2017).

Pada konteks hubungan internasional, realisme politik selalu mendasarkan pendapat mereka pada kenyataan, pada apa yang ada, bukan pada apa yang seharusnya ada, seperti yang diklaim oleh idealisme politik. Menurut kaum realis, konflik sudah ada di depan mata di dunia nyata karena sifat anarkis yang melekat pada sifat manusia dan karena jalan yang dipilih oleh penduduk dunia lebih tertarik untuk mengorganisir negara yang berdaulat dan independen yang cenderung tidak menghormati otoritas di luar atau di luar atau di atas negaranya (Asrudin, 2014).

Dengan demikian, cara berpikir realis didasarkan pada keinginan untuk berkuasa dan mendominasi yang muncul dari sifat alamiah manusia sebagai sumber konflik. Dalam premis

ini, negara dipandang sebagai unit analisis utama, baik ketika membahas masyarakat politik Yunani Kuno (polis) maupun masyarakat politik modern (negara bangsa), dan studi HI adalah studi tentang interaksi antara unit-unit masyarakat politik. Seorang realis yang menggunakan konsep sistem mendefinisikan istilah sistem dalam konteks sistem internasional yang mencakup negara-negara sebagai komponennya. Aspek-aspek lain dalam sistem internasional yang bukan negara, seperti organisasi internasional, kerja sama multinasional, dan kelompok transnasional, juga merupakan partisipan, meskipun fungsinya tidak terlalu esensial dibandingkan dengan negara (Asrudin, 2014).

Dalam perspektif realis, keamanan nasional juga merupakan prioritas atau perhatian utama. Keamanan militer dan masalah strategis merupakan hal yang sangat penting dan berada di bawah lingkup *high politics*, menurut kaum realis. Sementara itu, kaum realis menganggap ekonomi dan isu-isu sosial sebagai hal biasa yang termasuk dalam lingkup *low politics*. Realisme juga menganalisis kekuasaan dan otonomi dalam hubungan internasional, serta kurangnya keharmonisan di antara bangsa-bangsa, oleh karena itu kemampuan militer adalah kemampuan yang paling relevan.

Kaum realis tidak menolak prinsip-prinsip moral, namun dalam praktiknya, moralitas individu ditentang oleh kepentingan kelangsungan hidup negara dan penduduknya, serta kepentingan nasional itu sendiri (Asrudin, 2014). Negara, menurut kaum realis, adalah aktor utama di panggung dunia. Negara, sebagai aktor utama, berkewajiban untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya di kancah politik internasional. Dalam hal ini, negara diasumsikan sebagai entitas tunggal yang rasional. Artinya, di tingkat negara, konflik-konflik politik telah diatasi untuk membentuk satu suara.

Sementara itu, negara dianggap rasional karena dapat memperhitungkan bagaimana memaksimalkan hasil dengan memaksimalkan kepentingan. Seorang realis juga memperhatikan atau menjaga stabilitas internasional dengan mengantisipasi kemungkinan

gagalnya upaya menjaga stabilitas, memperhitungkan manfaat pemaksaan sebagai cara untuk menyelesaikan perselisihan, dan memberikan perlindungan terhadap tindakan pelanggaran perbatasan (Asrudin, 2014). Oleh karena itu, kekuasaan menjadi istilah yang penting dalam konteks ini. Keamanan nasional dan kelangsungan hidup negara merupakan landasan normatif dari realisme; keduanya merupakan cita-cita yang memotivasi teori realis dan kebijakan luar negeri realis.

Sejak tahun 1947 dimana bermulanya sengketa Laut China Selatan justru bukan menjadi alasan redupnya konflik ini dimata internasional, hal ini didasari oleh beberapa faktor seperti politik, ekonomi dan persepsi yang membuat beberapa stabilitas negara terganggu. Klaim atas Laut China Selatan yang bermula Ketika China dan Taiwan menetapkan klaim sebesar 90% wilayah tersebut, tentunya negara sekitar Kawasan merasa klaim yang tidak adil bahkan memicu klaim yang berbeda antara negara yang memiliki hak atas wilayah tersebut. Perbedaan klaim itulah yang justru mempersulit penyelesaian sengketa yang berkepanjangan.

Hadirnya Amerika Serikat dalam sengketa ini sudah bukan menjadi hal yang baru, melihat bahwa dalam berbagai kesempatan seperti dalam pernyataan Presiden Obama dalam pertemuannya dengan Kepala Negara anggota ASEAN (Ebbinghausen, 2012), pernyataan AS *Secretary of State*, Hillary Clinton dalam KTT Asean Regional Forum di Kamboja pada 2012 dengan membawa konflik Laut China Selatan sebagai isu utama pembahasannya (VOA, 2012), lalu kemudian pada tahun pertama kepemimpinan Joe Biden tahun 2021 dengan Menteri Luar Negeri AS yang menjabat yakni Antony Blinken menolak klaim maritim China di LCS karena itu telah melebihi zona maritim yang diizinkan untuk diklaim China berdasarkan hukum internasional (Arbar, Ikuti Trump, Biden Tolak Xi Jinping di Laut China Selatan, 2021).

Namun, dibalik itu tentunya terdapat alasan lain yang menyebabkan Amerika Serikat mengambil langkah untuk mengintervensi sengketa LCS baik pada era Trump maupun Biden. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa intervensi Amerika Serikat merupakan salah satu bagian dari asumsi dasar realisme dimana negara sebagai aktor utama memiliki peran signifikan harus bersaing guna mencapai kepentingan nasionalnya yang menjadi faktor pembentukan kebijakan luar negeri suatu negara yang tujuannya untuk memperoleh *power* pada masing masing kepemimpinan.

## 2. Teori geopolitik

Geopolitik merupakan sebuah istilah yang telah digunakan dalam hubungan internasional selama berabad-abad. Studi ini membahas hubungan antara geografi dan politik secara universal, serta bagaimana hubungan ini mempengaruhi perilaku bangsa dan negara. Geopolitik adalah gagasan yang rumit dan beragam yang telah memicu banyak perdebatan dan diskusi di kalangan akademisi dan pembuat kebijakan (Chapman, 2011). Geopolitik juga memiliki arti sebagai kajian akademik geografi, sejarah, dan ilmu sosial dengan mengacu pada politik ruang dan polanya dalam berbagai skala.

Dalam bidang multidisiplin, Geopolitik menjadi terma yang mencakup semua bidang ilmu sosial, dengan fokus pada geografi politik, hubungan internasional, ilmu politik teritorial, dan hukum internasional. Baso Madiung, dkk mengemukakan dalam karyanya "*Pendidikan Kewarganegaraan: Civic Education*" bahwa geopolitik berasal dari istilah geo dan politik. Geo berarti "bumi", sedangkan politik berasal dari kata Yunani politeia. Poli mengacu pada persatuan mereka yang berdiri sendiri, sedangkan teia mengacu pada bisnis. Geopolitik umumnya digunakan sebagai istilah samar untuk politik internasional dalam pembahasan dewasa ini. Geopolitik adalah studi tentang pengaruh geografis pada dinamika kekuasaan dalam hubungan internasional.

Istilah geopolitik ditemukan sekitar pergantian abad ke-20 oleh ilmuwan politik Swedia Rudolf Kjellén, dan menyebar ke seluruh Eropa pada era antara Perang Dunia I dan II (1918-39) sebelum digunakan secara luas selama Perang Dunia II. Menurut Budi Juliardi, istilah geopolitik berasal dari bahasa Yunani, khususnya Geos, yang berarti bumi (termasuk ruang/wilayah atau geografi) sebagai tempat kehidupan dan pemberi kehidupan, serta wilayah negara. Sedangkan politik berasal dari kata “politeia”. Politeia sendiri berasal dari kata “polis” yang berarti “kota/negara atau kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, dan “teia” yang berarti kebijakan/urusan yang berarti kepentingan umum warga suatu bangsa (Zulfikar, 2021). Jadi politeia berarti kebijakan penyelenggaraan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), geopolitik adalah ilmu yang mempelajari faktor-faktor geografis pada penyelenggaraan negara atau dengan kata lain KBBI juga mengartikan geopolitik sebagai kebijakan negara atau bangsa menurut letak geografisnya.

Sejarah geopolitik dimulai pada abad kesembilan belas dimana seorang tokoh bernama Frederich Ratzel (1844-1904), pencetus istilah itu, menggambarkan geopolitik sebagai geografi politik (Political Geography). Gagasan geopolitik mengandung dua pengertian, yang pertama ialah geopolitik sebagai ilmu: menawarkan perspektif yang tidak memihak kita sebagai bangsa hidup berdampingan dan terlibat dengan negara lain dalam pergaulan internasional, lalu yang kedua yaitu geopolitik sebagai ideologi (landasan keilmuan tindakan politik suatu negara): berupaya mengubah pemahaman tersebut menjadi cara pandang kolektif guna menjalankan, memelihara, dan mempertahankan semangat kebangsaan (Sulisworo, Wahyuningsih, & Arif, 2012). Selain itu, fisikawan Inggris Halford Mackinder mengusulkan gagasan Heartland pada saat itu. Menurut hipotesis ini, negara yang mendominasi Eurasia Tengah akan menguasai dunia (Dinia, 2018).

Setelah Perang Dunia II, popularitas teori geopolitik menurun karena hubungannya dengan agresi Nazi Jerman dan kekaisaran Jepang, serta munculnya bahan peledak nuklir dan

rudal balistik, yang mengurangi pentingnya faktor geografis dalam keseimbangan kekuatan strategis global. Namun, geopolitik terus mempengaruhi politik internasional, bertindak sebagai dasar untuk strategi pertahanan Perang Dingin Amerika Serikat, yang dibuat oleh George Kennan sebagai rencana geopolitik untuk membatasi pertumbuhan Uni Soviet.

Ahli geografi politik mulai memperluas geopolitik untuk memasukkan elemen ekonomi dan militer (Deudney, 2023), hal tersebut guna memahami bagaimana kemampuan industri transportasi, komunikasi, dan penghancuran yang baru-terutama rel kereta api, kapal uap, pesawat terbang, telegrafi, dan bahan peledak berinteraksi dengan fitur geografis berskala terbesar di Bumi untuk membentuk karakter, jumlah, dan lokasi yang layak. Unit keamanan dalam sistem internasional global yang muncul.

Sebagian besar percaya bahwa era baru politik dunia akan ditandai dengan penutupan perbatasan, unit teritorial yang lebih besar, dan persaingan antarnegara yang intens; sebagian besar juga percaya bahwa pergolakan besar akan segera terjadi, dan bahwa sistem perimbangan kekuatan yang telah membantu menjaga ketertiban dalam memperluas batas, negara mampu kian meluaskan batas-batas negaranya secara damai maupun kekerasan seperti peperangan yang dapat terjadi apabila tidak lagi mampu untuk mencapai tujuannya. Namun, ahli geopolitik terbagi atas jenis, jumlah, dan lokasi entitas yang paling layak (Deudney, 2023).

Salah satu aspek terpenting geopolitik adalah gagasan tentang “lingkungan geopolitik” yang mengacu pada karakteristik fisik dan manusia dari suatu wilayah tertentu yang mempengaruhi pertumbuhan politik dan ekonominya yang menentukan tujuan dan sasaran strategis, dapat berdampak besar pada perilaku negara dan pemerintahan. Maka berdasarkan teori geopolitik ini, penulis akan menggunakan pandangan geopolitik sebagai ideologi yang dikemukakan pertama kali oleh Frederich Ratzel yang salah satu asumsinya ialah kekuatan suatu negara harus mampu bertanggungjawab atas pertumbuhannya, hal tersebut selaras

dengan semakin luas ruang dan potensi geografi yang ditempati oleh kelompok politik maka semakin besar kemungkinan kelompok politik itu tumbuh. Hal tersebut juga berkaitan dengan keberlangsungan hidupnya suatu bangsa akan kemampuan bertahannya yang tidak terlepas dari hukum alam, dimana hanya bangsa yang unggul saja yang dapat bertahan hidup terus dan berlangsung (Sulisworo, Wahyuningsih, & Arif, 2012).

Hadirnya kemungkinan perang dan daya saing antara negara dan pemerintah adalah salah satu masalah geopolitik yang paling mendesak. Ketika pemerintah berusaha untuk mempertahankan kepentingan mereka dan membangun pengaruh mereka dalam sistem internasional, pengejaran tujuan strategis terkadang dapat menimbulkan ketegangan dan konflik. Ketika pemerintah berusaha untuk menyeimbangkan kekuatan dan menjaga kepentingan mereka, geopolitik dapat mengarah pada pembentukan aliansi dan koalisi. Dengan demikian, berdasarkan pandangan tersebut maka konfrontasi kawasan Laut China Selatan menjadi suatu momentum bagaimana Amerika melakukan upayanya dalam mencapai tujuan di kawasan Laut China Selatan sebagaimana kekuatan yang telah dikerahkan menuju kawasan tersebut maka timbul sebuah rasa tanggung jawab atas pertumbuhan kawasan tersebut terkait potensi geografi serta jaminan kestabilan kawasan.

#### **1.4. HIPOTESA**

Adapun hipotesa yang diambil penulis berdasarkan rumusan masalah yang didasarkan pada penggunaan teori realisme dan teori geopolitik terkait perubahan kebijakan Amerika Serikat dalam konfrontasi Laut China Selatan sebagai upaya menjaga stabilitas kawasan yang bebas dan terbuka pada era Presiden Biden adalah keberhasilan kebijakan Amerika Serikat pada era Joe Biden dalam memberikan jaminan kestabilan keamanan di kawasan yang terlibat dalam konfrontasi Laut China Selatan melalui kebijakan yang moderat.

### **1.5. TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian ini disusun dengan tujuan untuk mendeskripsikan dampak dari berlangsungnya konfrontasi Laut China Selatan serta upaya-upaya yang dilakukan oleh Amerika Serikat guna terciptanya Kawasan Laut China Selatan yang stabil, bebas dan terbuka. Selain itu, penulis juga akan menyampaikan arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap konfrontasi Laut China Selatan dalam dua kepemimpinan yang berbeda antara era Presiden Donald Trump dengan era Presiden Joe Biden saat ini.

### **1.6. JANGKAUAN PENELITIAN**

Penelitian ini akan dibatasi berdasarkan jangka waktu dan focus analisis. Pada jangka waktu penulis menentukan rentang waktu dari tahun 2018 sampai tahun 2023. Hal ini diawali ketika peralihan kepemimpinan Amerika Serikat yang saat itu dipimpin oleh Presiden Donald Trump menuju kepemimpinan Presiden Amerika Serikat saat ini yakni Joe Biden, dimana kedua pemimpin tersebut memiliki arah kebijakan luar negeri yang cukup bertolak belakang terutama dalam hal yang berkaitan dengan China melalui sengketa Laut China Selatan.

### **1.7. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data sekunder. Teknik pengambilan data dilakukan melalui studi literatur dengan sumber data berupa jurnal, buku, artikel berita dan website. Selain itu penelitian ini menggunakan model pendekatan deskriptif analitis. Pendekatan deskriptif analitis merupakan sebuah metode yang digunakan untuk menjelaskan suatu fenomena sosial yang diteliti secara terperinci. Selain itu pendekatan ini digunakan penulis guna memahami secara mendalam mengenai suatu kejadian yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti. Dalam hal ini penulis menggunakan teori dan data yang ditemukan terkait kebijakan Amerika Serikat dalam konfrontasi Laut China Selatan sebagai upaya menjaga stabilitas kawasan yang bebas dan terbuka.

## **1.8. SISTEMATIKA KEPENULISAN**

Sistematika kepenulisan skripsi bertujuan untuk memudahkan pemahaman penulis dalam proses penyusunan skripsi. Umumnya, dalam kepenulisan skripsi akan terbagi menjadi beberapa bab, yaitu:

**BAB I**, pada bab ini penulis akan memaparkan latar belakang masalah, jangkauan penelitian, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, metode penelitian dan sistematika kepenulisan.

**BAB II**, pada bab ini penulis akan mendeskripsikan konflik yang terjadi dalam konfrontasi Laut China Selatan beserta aktor-aktor yang terlibat dalam konfrontasi ini, penulis juga akan menjelaskan dampak yang ditimbulkan akibat konfrontasi tersebut.

**BAB III**, pada bab ini penulis akan menguraikan peralihan kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada era Presiden Donald Trump menuju era pemerintahan Joe Biden sebagai upaya dalam menjaga stabilitas kawasan Laut China Selatan yang bebas dan terbuka yang dikorelasikan dengan situasi yang terjadi sesuai dengan teori Realisme dari Morgenthau dan teori Geopolitik oleh Frederich Ratzel yang bertujuan guna menjawab pertanyaan penelitian yang ada.

**BAB IV**, pada bab ini penulis akan menyampaikan kesimpulan berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan membuat saran sehubungan dengan kesimpulan yang dimaksud.